

ANALISIS HUKUM TERKAIT DENGAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENGATURAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TROTOAR JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Dien Mas Ayu Putri Camelia

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis konflik hukum karena pada satu sisi melalui UU Pemda dan Perpres Nomor 125 Tahun 2012 memberikan kewenangan kepada Gubernur didasarkan Permen PU 03/PRT/M/2014 untuk melakukan penataan jalan Jatibaru Tanah abang Jakarta Pusat demi pelaku usaha kecil seperti PKL. Namun di sisi lain melalui UU LLAJ tidak memberikan kewenangan kepada Gubernur dalam melakukan penataan ruas jalan karena penataan ruas jalan merupakan urusan pemerintahan yang dialihkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata kunci: *Lalu Lintas, Otonomi Daerah, PKL.*

Abstract

This research was conducted with the aim of analyzing legal conflicts because on the one hand, through the Regional Government Law and Presidential Decree No. 125/2012 giving authority to the Governor based on Permen PU 03 / PRT / M / 2014 to organize the Jatibaru Tanah Abang road in Central Jakarta for the sake of small business actors such as Street vendors. But on the other hand, through the LLAJ Law it does not give authority to the Governor in arranging road sections because the arrangement of road segments is a government affair that is transferred to the State Police of the Republic of Indonesia..

Keywords: *PKL, Regional Autonomy, Traffic.*